

Laporan baru menunjukkan memburuknya situasi Anggota Parlemen yang menghadapi risiko di Asia Tenggara

JAKARTA — Anggota parlemen di Asia Tenggara terus menghadapi risiko pembalasan karena menjalankan mandat mereka atau mengungkapkan pendapat politik mereka, menurut laporan tahunan terbaru Parliamentarians At Risk dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), yang diluncurkan hari ini di Jakarta.

“Meningkatnya risiko, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun bentuk yang lain, yang dihadapi oleh anggota parlemen di kawasan ini sama sekali tidak dapat diterima dan harus menjadi perhatian utama. Anggota parlemen adalah perwakilan rakyat dan keselamatan serta kebebasan mereka mencerminkan kesehatan demokrasi di tempat mereka bekerja. Kami menyerukan kepada ASEAN, serta negara-negara anggota ASEAN, untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka dan menekan pemerintah yang secara sewenang-wenang dan tidak adil menganiaya anggota parlemen mereka,” ujar Mercy Barends, anggota DPR RI dan Ketua APHR.

Tren ini terus memburuk di tahun 2022 bagi anggota parlemen yang bekerja di wilayah beresiko, khususnya di Myanmar, di mana anggota parlemen menghadapi bahaya yang meningkat setelah kudeta 1 Februari 2021. Seorang anggota parlemen, Kyaw Myo Min, disiksa sampai mati dalam tahanan dan seorang mantan anggota parlemen, Phyo Zeya Thaw, dieksekusi bersama dengan tiga tahanan politik di Myanmar. Jumlah anggota parlemen yang ditahan di seluruh Asia Tenggara tetap tinggi yaitu 85 orang, terdiri dari 84 orang di Myanmar dan mantan senator Leila de Lima di Filipina.

“Bahkan anggota parlemen Myanmar yang berhasil mengungsi ke negara tetangga seperti Thailand tetap berada dalam situasi yang sangat genting. Banyak dari mereka tinggal di kota-kota di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar dan terus-menerus dilecehkan oleh polisi sebagai migran tidak berdokumen, dan hidup dalam ketakutan ditahan atau, lebih buruk lagi, dipulangkan ke negara mereka, di mana mereka akan

ditangkap, dan kemungkinan besar akan disiksa, atau mendapat perlakuan yang lebih buruk lagi, di tangan junta,” kata Charles Santiago, mantan anggota Parlemen Malaysia, dan Ketua Bersama APHR.

Di luar Myanmar, khususnya di Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Thailand, kasus serangan fisik masih jarang terjadi, tetapi pemerintah sering menggunakan tuduhan bermotivasi politik terhadap anggota parlemen oposisi. Pembalasan dan ancaman tidak hanya bersifat yudisial. Anggota parlemen juga menghadapi serangan *online*, dan menjadi korban kampanye disinformasi serta ujaran kebencian.

Di Kamboja, pemerintah Perdana Menteri Hun Sen telah melakukan serangkaian persidangan massal dan menghukum lebih dari 100 anggota dan pendukung Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), termasuk sejumlah mantan anggota parlemen secara *in absentia*. Penganiayaan dan intimidasi politik oleh pemerintah terhadap anggota dan pendukung partai oposisi, pembela hak asasi manusia, aktivis perlindungan hak atas tanah dan lingkungan, dan jurnalis diperkirakan akan terus meningkat menjelang pemilihan umum berikutnya, yang diperkirakan akan diadakan pada bulan Juli 2023.

“Hun Sen dan partainya perlahan membangun kediktatoran satu partai selama bertahun-tahun. Prosesnya sangat lambat sehingga hanya sedikit yang menyadarinya, tetapi tanda-tandanya sangat jelas dan telah menghasilkan negara yang hampir otoriter. Komunitas internasional harus meminta pertanggungjawaban pemerintah Hun Sen atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan memastikan partai oposisi dan kandidat mereka dapat bersaing dalam pemilihan umum 2023 di lingkungan yang bebas dan adil dengan lapangan permainan yang setara sebelum terlambat,” ungkap Kasit Piromya, mantan Menteri Luar Negeri Thailand dan Anggota Dewan APHR.

Sementara itu, di Malaysia dan Filipina, disinformasi dan ujaran kebencian di dunia siber terhadap anggota parlemen terus meluas. Anggota parlemen oposisi di Filipina dan Thailand juga sering menghadapi serangan yudisial melalui penggunaan undang-undang yang terlalu luas, sementara keberadaan undang-undang yang



kejam seperti Undang-Undang Penghasutan dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia di Malaysia tetap menjadi ancaman yang membayangi para pengkritik pemerintah.

“Penggunaan hukum sebagai senjata melawan politisi adalah penyimpangan dari prinsip-prinsip negara hukum, yang merupakan salah satu landasan demokrasi. Di beberapa negara di Asia Tenggara, hukum dan pengadilan digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran. Penting untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak kebal hukum,” menurut Mu Soeha, mantan anggota parlemen dari Kamboja dan Anggota Dewan APHR.